



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Teerakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN/-PT/Akred/S/XII/2014

Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kawasan PKL Cicadas Jalan Ahmad Yani Kota Bandung)

Skripsi

Oleh
Lidwina Pancarwati
2012310079

Bandung
2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/AKRED/S/XII/2014

Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kawasan PKL Cicadas Jalan Ahmad Yani Kota Bandung)

Skripsi

Oleh
Lidwina Pancarwati
2012310079

Pembimbing
Deny M . T. Aryadi, Drs., M.Si

Bandung
2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Lidwina Pancarwati
Nomor Pokok : 2012310079
Judul : Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
(Studi Kasus Kawasan PKL Cicadas Jalan Ahmad Yani
Kota Bandung)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 19 Desember 2017
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota
Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D

Sekretaris merangkap pembimbing
Denny M. Tri Aryadi, Drs., M., Si

Anggota
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

fra
[Signature]
[Signature]

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[Signature]
Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lidwina Pancarwati
NPM : 2012310079
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
(Studi Kasus Kawasan PKL Cicadas Jalan Ahmad
Yani Kota Bandung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Desember 2017

METERAI
TEMPEL
D188 AB5009984397
6000
ENAM RIBURUPIAH
Lidwina Pancarwati

Abstrak

Nama : Lidwina Pancarwati
NPM : 2012310079
Judul : Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
(Studi Kasus Kawasan PKL Cicadas Jalan Ahmad Yani
Kota Bandung)

Judul penelitian ini adalah, “Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (studi kasus kawasan PKL Cicadas Kota Bandung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Bandung dapat menerapkan Peraturan Walikota No.888 Tahun 2012, pasal 32 dan 33 tentang pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima. Tentang pembinaan dan pengawasan ditinjau dari Bimbingan Tehknis, Penyuluhan dan Pelatihan, Memfasilitasi program magang, Mefasilitasi studi program komparatif, Memberikan bantuan manajemen, Memberikan bantuan sumber dana, Melakukan promosi relokasi untuk PKL, dan Peran SATGASUS.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Jalan Ahmad Yani kawasan Cicadas. Wawancara dilakukan kepada Pedagang Kaki Lima, Dinas K UKM, Kecamatan Cibeunying Kidul, Satpol PP dan masyarakat yang berada di Jalan Ahmad Yani kawasan Cicadas Kota Bandung.

Hasil penelitian pelaksanaan pembinaan masih kurang efektif, karna banyaknya hambatan selama pelaksanaan yaitu, para PKL kawasan Cicadas masih kurang merespon baik program dari pemerintah, dan waktu pelaksanaan masih tidak terjadwal secara rutin.

Rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah pelaksanaan pembinaan khususnya materi bimtek harus memiliki kejelasan tujuan dan rencana-rencana yang riil sehingga dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh PKL kawasan Cicadas dan dalam pelaksanaan pembinaan hendaknya sosialisasi maupun penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dipahami oleh penerima informasi. Sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dari Implementasi.

Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan, dan Pengawasan.

Abstract

Name : Lidwina Pancarwati
NPM : 2012310079
Title : Guidance and Supervision of Street Traders (a case study
of the Street Traders in Cicadas, Bandung City)

The title of this study is, “Guidance and Supervision of Street Traders (a case study of the Street Traders in Cicadas, Bandung City). This study aims at examining how the government of Bandung implements Mayor Regulation No.888/2012, Article 32 and 33 on the guidance and supervision of street traders. The guidance and supervision are explored through the technical guidance, the facilities of the internship program, the facilities of the comparative study program, the management assistance, funding assistance, the socialization of relocation of the street traders, and the role of SATGASUS.

This study employs the descriptive-qualitative method and the data collected through a document, in-depth interview, and observation conducted on Ahmad Yani Street, in Cicadas. The participants of the interview are the street traders, Dinas K UKM of Kecamatan Cibeunying Kidul, Satpol PP, and the people around Ahmad Yani Street.

This study shows that the guidance is less effective due to many obstacles such as the street traders around Ahmad do not respond the government’s program well and the guidance is not intensively conducted.

This study recommends that the guidance, especially related to the material of technical guidance should have a clear goal and real plans so that the street traders can comprehend and accept the goal as well as the plans. In addition, the socialization and the delivery of clear information of the guidance should be given as clear as possible so that the better implementation of the guidance can be achieved.

Keywords: Implementation, Guidance, and, Supervision.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Ahmad Yani Kawasan Cicadas Kota Bandung)”. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat utama dalam menempuh ujian akhir Program Strata-1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak terutama kepada Mama, Bapak, yang selalu mendoakan untuk yang terbaik. Kemudian kepada Bapak Deny Marcelinus Tri Aryadi selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membantu dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya selesai.

Dalam kesempatan ini pula, tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, Drs., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
2. Tutik Rachmawati, S.IP., MA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

3. Segenap dosen pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Segenap staf administrasi dan staf pelaksana pendukung lainnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
5. Kepada saudara-saudara Teh Septi, Teh Lia, Teh Febri, Mas Agung, A Erik, Teh Amel, Maura, Gilang , penulis mengucapkan terimakasih telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Kepada, Muhammad Iqbal, Fanny Setiawan, Hanna Triana, Aries Eka, Chyntia, Jenny, Eva, Isal, Sandy, Obun , Della, Putri, Grace, Ria, Novi, Susanto, penulis mengucapkan terimakasih telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat penulis tuturkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Bandung, 19 Desember 2017

Lidwina Pancarwati

Daftar Isi

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORITIK	12
2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	12
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.4 Fokus Implementasi Kebijakan Publik	18
2.5 Definisi <i>What's Happening and Why?</i>	21
2.5.1 <i>What's Happening and Why?</i> (Apa yang Terjadi dan Mengapa ?)	21
2.5.1.1 <i>The Profusion of Actors</i> (Banyaknya Aktor yang Terlibat).....	21
2.5.1.2 <i>The Multiplicity and Vagueness of Goals</i> (Kejelasan Tujuan)	23
2.5.1.3 <i>The Proliferation and Complexity of</i> <i>Government Programs</i> (Perkembangan dan Kerumitan Program).....	23

2.5.1.4	<i>The Participation of Governmental Units at AllTerritorial Levels (Partisipasi Pada Semua Unit Pemerintahan).</i>	23
2.5.1.5	<i>The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation (Faktor-Faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi)</i> ..	23
2.6	Model Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis Penelitian	28
3.2	Peran Penelitian	28
3.3	Lokasi Penelitian.....	29
3.4	Teknik Penumpulan Data.....	29
3.4.1	Observasi	30
3.4.2	Wawancara	30
3.4.3	Dokumentasi.....	31
3.5	Validitas Data	31
3.6	Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM		35
4.1	ProfilSatuanTugasKhusus (SATGASUS) Pedagang Kaki Lima Kota Bandung.....	35
4.1.1	Profil SATGASUS PKL Kota Bandung.....	35
4.1.2	Visi dan Misi Satuan Tugas Khusus Pedagang Kaki Lima	36
4.1.3	Tugas Pokok Satuan Tugas Khusus Pedagang Kaki Lima.....	36
4.2	Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	38
4.2.1	Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	39
4.2.2	Visi Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	39
4.2.3	Struktur Organisasi Dinas KUKM Kota Bandung	40
4.3	Profil Satuan Polisi Pamong Praja	45
4.3.1	Visi Misi Satuan Pamong Praja	47
4.3.2	Tugas Pokok Satuan Pamong Praja	47

4.3.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	47
4.4 Profil Kecamatan Cibeunying Kidul	49
4.4.1 Visi dan Misi Kecamatan Cibeunying Kidul.....	49
4.4.2 Tugas Pokok Kecamatan Cibeunying Kidul	49
4.4.3 Stuktur Organisasi Kecamatan Cibeunying KIdul	50
4.5. Deskripsi Wilayah Dan Karakteristik PKL Di Kawasan Cicadas.	51
BAB V HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKL DIKAWASAN CICADAS	52
5.1 Pembinaan.....	52
5.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis	53
5.1.2 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan.....	55
5.1.3 Fasilitasi Program Magang.....	57
5.1.4 Memberikan Bantuan Manajemen kepada PKL	58
5.1.5 Memfasilitasi Sumber Pendanaan	65
5.1.6 Mempromosikan Lokasi PKL Sebagai Lokasi Wisata Belanja	68
5.1.7 Kegiatan LainnyaSebagaiUpayaUntuk Menunjang Pembinaan PKL	69
5.1.8 PengawasanKegiatan PKL di kawasan Cicadas.....	70
5.2 Penerapan Peraturan Walikota Berdasarkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PKL Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012.	76
5.3 Teori implementasi Ripley and Franklin dengan pendekatan What’s Happening and Why Terhadap Pembinaan dan Pengawasan PKL Kawasan Cicadas Kota Bandung	79
5.3.1 Banyaknya aktor yang terlibat dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan PKL Kawasan Cicadas Kota Bandung	80
5.3.2Kejelasan Tujuan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan PKL Kawasan Cicadas Kota Bandung	84

5.3.3 Kompleksitas program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan PKL Kawasan Cicadas Kota Bandung	87
5.3.4 Partisipasi Semua Unit Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan PKL Kawasan Cicadas Kota Bandung	89
5.3.5 Faktor – Faktor Yang Tidak Terkendali Mempengaruhi Implementasi Dalam Pelaksa naan Pembinaan Dan Pnegawasan PKL Kawasan Cicadas Kota Bandung	91
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Tabel jumlah data Pedagang Kaki Lima Cicadas.....	5
-----------	---	---

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Ilustrasi PKL yang berjualan di Trotoar dan jalan dikawasan Cicadas Ahmad Yani Kota Bandung	2
Gambar 1.2 Situasi Satpol PP Berdialog Bersama PKL Cicadas	8
Gambar 2.1 Model Penelitian	25
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas K UKM Kota Bandung	41
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bandung	45
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Perizinan Penelitian
- Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Kecamatan
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Dinas KUKM
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan
- Lampiran 5. Contoh Kartu Pengenal PKL Cicadas
- Lampiran 6. Brosur Persyaratan Pendanaan PKL
- Lampiran 7. Sampel Data Jumlah PKL Cicadas
- Lampiran 8. Data Hasil Wawancara
- Lampiran 9. Pedoman Peraturan Walikota No. 888 Tahun 2012 Dokumentasi
Pembinaan dan Pengawasan PKL Cicadas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima atau yang disebut PKL menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan.¹ Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima di Kota Bandung, menimbulkan suatu masalah rumit, disatu sisi sektor tersebut merupakan penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

Bagi PKL memilih ruang publik sebagai tempat berdagang merupakan hal biasa dan bukan masalah. Salah satu pertimbangan utama PKL memilih ruang publik sebagai tempat usaha adalah karena memiliki potensi ramai pembeli. Kehadiran PKL sering dijadikan penyebab kesemrawutan lalu lintas, tidak bersihnya lingkungan, membuat kondisi kumuh dan jalanan tidak teratur serta, menyebabkan sampah-sampah berserakan dan menumpuk di beberapa tempat.²

Seperti contoh PKL di kawasan Cicadas Jl. Ahmad Yani, bahwa dengan kondisi jalan raya cukup lebar dan ruas sisi yang seharusnya dipergunakan untuk pejalan kaki dan arus lalu lintas menjadi semakin padat dan sempit, hal tersebut dapat dilihat dari Gambar dibawah ini:

¹<http://kbbi.kata.web.id/pedagang-kaki-lima/> tanggal 6 febuari 2017 jam 13.26 WIB

²file:///G:/New%20folder/sumber_Wina/evaluasi-penanganan-masalah-pkl-di-kota-bandung-masih-nihil.html 5 maret 2017.

Gambar 1.1
PKL yang berjualan di trotoar dan jalan dikawasan Cicadas Jalan Ahmad Yani Kota Bandung



Sumber: data lapangan tgl 20 juni 2017 pkl 16.00WIB

Dengan itu pemerintah membentuk tim untuk membina dan mengawasi kegiatan PKL. Pada dasarnya Pembinaan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung no.888 Tahun 2012 pada pasal 32 ayat 1 adalah; meningkatkan kemampuan usaha PKL menjadi pedagang Non Formal dan selanjut menjadi pedagang Formal³. Lembaga pelaksana pembinaan dan pengawasandalam hal ini adalah Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) Kota Bandung. Walikota Kota Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) sebagai lembaga-lembaga / instansi pemerintah yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Sesuai dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Walikota Kota Bandung no.888 tahun 2012, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang isinya menyangkut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat ikut berperan dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah menjadi PKL yang taat akan aturan. Secara khusus pelaksanaan pembinaan dalam Pasal 32 Ayat 3 dilakukan dengan cara:

³Peraturan Walikota Bandung No.888 Tahun 2012, hal 44.

- a. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis.
- b. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan.
- c. Memfasilitasi program .
- d. Memfasilitasi program studi komparatif
- e. Memberikan bantuan manajemen
- f. Memfasilitasi sumber pendanaan
- g. Mempromosikan lokasi PKL yang ditetapkan sebagai lokasi wisata belanja
- h. Kegiatan lainnya yang menunjang pembinaan PKL.

Dari poin-poin diatas, salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah PKL, maka dilakukan pembinaan PKL yang dimulai sejak tahun 2012.

Kegiatan pembinaan PKL yang dilakukan salah satunya adalah bimbingan teknis langsung dengan meningkatkan cara berdagang dalam kemampuan usaha PKL, dan melakukan pencatatan tanda pengenal khusus bagi PKL wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 888⁴. Setiap PKL wajib memiliki tanda pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota. Tanda pengenal khusus PKL tersebut dapat di delegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat menjadi SKPD). Tanda pengenal berlaku paling lama 1 tahun serta tidak dapat dipindah tangankan. PKL dapat memperbaharui tanda pengenal sepanjang lokasi atau tempat berdagang PKL tersebut tidak dikembalikan pada fungsi semula (ruang publik).

Pelaksanaan kegiatan pembinaan bimbingan teknis diharapkan dapat meminimalisasi dan mengatasi berbagai kesemerawutan jalan yang berkaitan

⁴Peraturan Penataan dan Pembinaan Satgasus Kota Bandung-kantor dinas K UKM.

dengan PKL kota Bandung. Adapun susunan Anggota Pembinaan dan Pengawasan dalam SATGASUS yaitu⁵ :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan
- b. Kecamatan dan Kelurahan
- c. Satpol PP
- d. PD Kebersihan dan PD Pasar Bermartabat

Unsur–unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut diharapkan dapat memahami ketentuan teknis yang harus dijalankan dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman yang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang usaha non-formal (SR), program pembinaan bimbingan teknis bukan hanya berperan untuk meningkatkan cara berdagang dalam kemampuan usaha PKL dan melakukan pencatatan penertiban tanda pengenal khusus bagi pkl wilayah Kota Bandung saja, namun untuk mengatasi, menertibkan, dan mengurangi PKL yang berdagang dititik terlarang (zona merah). Kawasan Cicadas jalan Ahmadyani, yang sudah diatur di Peraturan Walikota no.888 tahun 2012 pada pasal 8 dan pasal 15 ayat 25, merupakan kawasan yang sulit dibenahi sehingga harapan dari program pembinaan dan pengawasan, para PKL terlebih dahulu dapat untuk dibina sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan padaperwal no.888 tahun 2012.⁶

Pemerintah melalui instansi berwenang yakni Dinas KUKM Kota Bandung telah menyediakan tempat yang sudah diatur dan diijinkan untuk

⁵Keputusan Wali Kota Bandung- Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

⁶ Hasil wawancara dikantor dinas K UKM-bidang Non Formal ibu(SR).5 september2017.

digunakan lahan berdagang. Akan tetapi, para PKL kawasan Cicadas semakin bertambah dan telah menggunakan lahan dagang diluar lokasi yang telah ditentukan pemkot⁷.

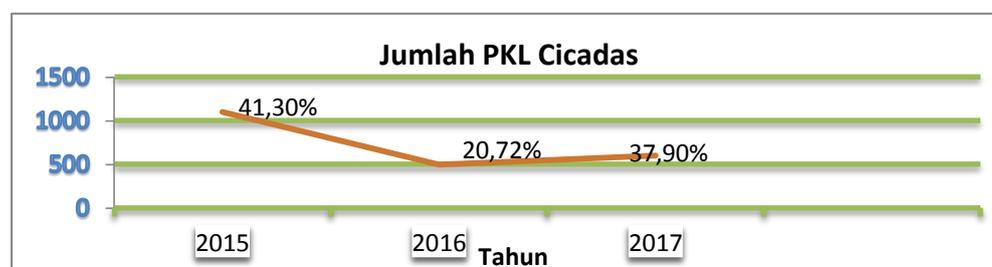
Menurut data yang diperoleh Dinas KUKM, dan Kecamatan Cibeunying Kidul dari tahun 2015 hingga tahun 2017 jumlah PKL selalu fluktuatif, dapat dilihat dalam tabel 1.1 dibawah ini.⁸

Tabel 1.1
Data Jumlah PKL Kawasan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

Jumlah PKL		
TAHUN	PKL	%
2015	1.101	41.30 %
2016	496	20.72 %
2017	602	37.90 %

Sumber : Arsip Data Jumlah PKL Kawasan Cicadas- Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan Kantor Dinas K UKM Kota Bandung (Data didapat tgl 19 Maret 2017 pkl 10.00 WIB dan 21 juni 2017pkl 10.00WIB)

Grafik 1.1
Jumlah PKL Kawasan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2015 – 2017



Sumber: Arsip Data Jumlah PKL Kawasan Cicadas- Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan Kantor Dinas K UKM Kota Bandung (Data didapat tgl 19 Maret 2017 pkl 10.00 WIB dan 21 juni 2017pkl 10.00WIB)

Berdasarkan data pada tahun 2015 jumlah PKL mencapai 1.105 orang, tahun 2016 menjadi 496 orang, kemudian ditahun 2017 PKL dikawasan Cicadas meningkat kembali mencapai 602 orang. Penurunan jumlah PKL Kawasan

⁷Angganugraha www.academia.edu/.../kebijakan_penanganan_pedagang_kaki_lima_p...

⁸Data jumlah PKL Kota Bandung, Dinas K.UKM Kota Bandung, dan kecamatan CibeunyingKidul

Cicadas yang terjadi ditahun 2015 dan ditahun 2016 merupakan bukti bahwa program pembinaan yang dilakukan itu menghasilkan dampak positif. Pembinaan tersebut mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat pejalan kaki agar mampu berjalan diatas trotoar dengan leluasa, dan mengurangi kemacetan. Namun diawal tahun 2017 terjadi kenaikan kembali, jumlah PKL Kawasan Cicadas menjadi 602 orang. Kenaikan jumlah PKL Kawasan Cicadas ditahun 2017 disebabkan karena pembinaan hanya bisa menjangkau para PKL Kawasan Cicadas untuk memiliki tempat yang strategis menggelar usahanya. PKL tersebut mengalami kesulitan jika harus memiliki tempat usaha yang aman, nyaman dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Dalam perkembangannya PKL kawasan Cicadas menghadapkan pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL Cicadas yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota. Terlepas dari hal tersebut, keberadaan sektor informal sudah menjadi realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat pejalan kaki. Hal ini berarti bahwa mengabaikan keberadaannya justru akan mempersulit pemerintah dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaannya yang banyak menjadi harapan masyarakat kelas bawah sebagai lahan mencari nafkah merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 agustus 2017 dengan para PKL pedagang pakaian, pedagang klontongan, dan pedagang makanan, penulis

⁹Lukman Sutrisno (1997) *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius, Yogyakarta.

menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pembinaan¹⁰. Menurut ketua pengurus PKL kawasan Cicadas Cibeunying Kidul kota Bandung, bapak (S) mengatakan bahwa banyak PKL enggan untuk dipindahkan ke lokasi yang baru, karena ditempat yang baru sepi pembeli sehingga penghasilan menurun, dan bertambahnya biaya operasional untuk berjualan ditempat yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di kantor satpol pp, menurut ketua Satpol pp kota Bandung bapak (D I), tugas utama pembinaan berdasarkan peraturan tersebut adalah kewajiban Pemerintah Kota Bandung, namun para satgasus khususnya Satpol PP tetap berupaya memberikan bimbingan teknis dan Pengawasan dengan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandung. Adapun upaya satpol pp yang sudah melayangkan surat peringatan, selalu disikapi tidak baik oleh para PKL dengan cara melakukan unjuk rasa. Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau dipindahkan ke tempat yang lebih baik, anggota Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi berupa penyuluhan setiap saat baik dalam keadaan berdinamis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik, dapat dilihat digambar 1.2 berikut;¹¹

Gambar 1.2

¹⁰Hasil wawancara kepada PKL Kawasan Cicadas. 14 Agustus 2017.

¹¹Hasil wawancara anggota Satpol PP Kota Bandung bapak (DI), di kantor satpol pp kota Bandung. 9 September 2017

Situasi dimana Satpol PP tepat berada bersama para PKL Cicadas sedang berdialog dan memberikan penyuluhan



Sumber: Kantor Satpol PP Kota Bandung, 2017.

Pada proses Implementasinya, Peraturan walikota dalam pembinaan dan pengawasan tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan, karena para PKL tidak menanggapi dan merespon dengan baik kegiatan yang diprogramkan oleh pihak satgasus, salah satunya dalam kegiatan bimtek. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan banyak PKL yang tidak turut berpartisipasi untuk mengikuti program tersebut, selain itu dilapangan banyak PKL yang masih melanggar tata tertib berjualan, dan keberadaan petugas satopl pp tidak dihiraukan, sehingga satgasus mengalami kesulitan mencari solusi dalam membina.¹² Dilain pihak Menurut PKL Kawasan Cicadas Bapak (OJ), para PKL menganggap adanya pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah hanya sebagai kegiatan biasa dan tidak ada solusi bagi para PKL¹³.

Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan upaya untuk memandu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan guna mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di dalam kebijakan¹⁴. Artinya, Implementasi Kebijakan akan mampu mendekatkan

¹²Hasil wawancara anggotadinas K UKM Kota Bandung . Bidang usaha Non Formal(SR), dikantor dinas k ukm kota bandung. 5 september 2017

¹³Hasil wawancara kepada ketua pedagang kaki lima(wilayah 2), OS. 14agustus 2017

¹⁴D.S. Van Meter dan C.E. Van Horn. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society*. 1974. Hal. 8

antara kebijakan dengan tujuannya jika para pemangku kepentingan menunjukkan tindakan yang taat terhadap sasaran yang telah digariskan di dalam kebijakan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perspektif dalam penelitian ini menggunakan model hybrid/Sintesis (Randall P. Ripley & Grace Franklin, 1982), yang memadukan kedua model sebelumnya (*Top-down dan Bottom up*) dengan tekanan utama yang bisa beragam, mulai pada jaringan interaksi antar aktor pelaksana sampai pada pendekatan sosiologis, dan sebagainya yang kemudian disebut sebagai teori atau model Hybrid. Model hybrid ini pada hakekatnya ingin menegaskan bahwa tidak ada model perspektif yang bisa diterapkan pada setiap masalah implementasi. Tiap kategori kebijakan memiliki kekhasan tersendiri, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Model hybrid sangat beragam mulai dari yang hanya mengemukakan variable yang dianggap mempengaruhi implementasi, untuk mempermudah pengkategorian berbagai pendekatan studi implementasi yang muncul belakangan. Hasil pemikiran yang berbeda-beda, implementasi tumbuh dari berbagai hasil penelitian mengenai praktek

implementasi pada era yang berbeda-beda, dan dengan fokus perhatian yang berbeda-beda pula.¹⁵ Oleh karena itu, implementasi merupakan salah satu hal untuk memberikan pembinaan dan pengawasan PKL apakah sudah berhasil mencapai tujuan dan sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul "**Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima**" (Studi Kasus Kawasan Pkl Cicadas Kota Bandung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Merumuskan tentang bagaimana pemerintah kota Bandung dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan PKL didalam implementasi bab VIII pada PERWAL No 888 Tahun 2012 di Jalan Ahmad Yani khususnya kawasan Cicadas di Kota Bandung.
2. Menjabarkan dan mendeskripsikan hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan PKL dalam implementasi bab VIII pada PERWAL No 888 Tahun 2012 di kawasan Cicadas khususnya di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung.

¹⁵Munawar Noor, (2015), <http://munawarnoor.blogspot.co.id/2015/06/penanggulangan-kemiskinan-di-indonesia.html>. Diakses 14 April 2017

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis :
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kajian kebijakan publik dan juga dapat memberikan manfaat ilmu di bidang pemerintahan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi masyarakat maupun pejabat pelaksana kebijakan selama masa studi dilapangan serta melatih sensitifitas peneliti dalam melihat permasalahan.
 - b. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan pemikiran dalam bentuk saran, sumber data dan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menghadapi masalah dikota Bandung.